

Program Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan

Riski Milianti Noviansa Dwi Rakhman^{1*}; Yufita Listiana²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Trunojoyo Madura

Email: riskimilianti@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21107/bep.v4i2.23638>

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze how the empowerment of salt farmers in Pesanggrahan Village, Kwanyar District is carried out by the Bangkalan Regency Fisheries Service. The method used is a descriptive qualitative approach with a case study method. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. This research uses a data validity test through source triangulation, then the data is analyzed and conclusions are drawn. The results of research using theory (Mardikanto & Soebiato, 2017) which suggests 4 scopes of community empowerment activities show that: a) Human Capacity Development, the Bangkalan District Fisheries Service carries out activities such as training/socialization, data collection and inventory of salt groups which is carried out at least once in one year, in person or online. b) Business Capacity Development, which has been very well proven by the assistance with production equipment provided in Pesanggrahan Village so that it can help and improve the quality and quantity of salt production. c) Environmental Capacity Development, there are two types of assistance from the Salt Farming Community Empowerment program which of course does not have an impact on the environment. d) Institutional Capacity Development, which has been very good, is proven by the creation of good relationships, coordination and cooperation between program implementers, namely the Bangkalan Regency Fisheries Service, and villages receiving assistance, including the Village Government, Pesanggrahan Village Community, and the Salt Farmers Group in Pesanggrahan Village.

Keywords: Empowerment, Salt Farmers, Fisheries Service.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemberdayaan petani garam di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, kemudian data dianalisis serta diambil kesimpulan. Hasil penelitian dengan menggunakan teori (Mardikanto & Soebiato, 2017) yang mengemukakan 4 lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan yaitu: a) Pengembangan Kapasitas Manusia, Dinas Perikanan Kabupaten

Bangkalan melakukan kegiatan seperti pelatihan/sosialisasi, pendataan dan inventarisasi kelompok garam yang dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun dengan secara langsung maupun online. b)Pengembangan Kapasitas Usaha, sudah sangat baik dibuktikan dengan adanya bantuan alat-alat produksi yang diberikan di Desa Pesanggrahan sehingga dapat membantu dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pada produksi garam. c)Pengembangan Kapasitas Lingkungan, terdapat duajenis bantuan dari program Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam yang tentunya dari program tersebut tidak berdampak pada lingkungan. d)Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, sudah sangat baik yaitu dibuktikan dengan terciptanya hubungan, koordinasi, kerja sama yang baik antara pelaksana program yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan dengan Desa penerima bantuan diantaranya ada Pemerintah Desa, Masyarakat Desa Pesanggrahan, dan Kelompok Petani Garam di Desa Pesanggrahan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Petani Garam, Dinas Perikanan.

PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia yang tiga perempat berupa lautan, hal ini menjadi peluang bagi Indonesia sebagai Negara Maritim yang kuat dan mandiri. Kedudukan Indonesia sebagai Negara kepulauan yang luas menjadikan setiap daerah memiliki potensi pengelolaan garam, namun dahulu hanya beberapa daerah yang terkenal sebagai daerah penghasil garam, salah satunya yaitu Pulau Madura Provinsi Jawa Timur (Rintiyani *et al.*, 2022). Pulau Madura merupakan daerah penghasil garam terbesar di Provinsi Jawa Timur sehingga dikenal dengan sebutan Pulau Garam, hal tersebut karena produksi garam yang dihasilkan menyuplai sepertiga dari produksi nasional (Aminuloh *et al.*, 2019).

Pulau Madura memiliki 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pamekasan. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten penghasil garam di pulau Madura (Rintiyani *et al.*, 2022).

Tabel 1 Produksi Garam di Pulau Madura Tahun 2019-2021

Kabupaten	Produksi (ton)		
	2019	2020	2021
Bangkalan	2.054,28	3.854,60	2.827,40
Pamekasan	152.540,90	38.836,30	42.812,86
Sampang	307.715,00	174.597,99	115.280,40
Sumenep	322.656,88	103.606,08	110.225,63
Total	784.967,06	323.600,98	275.078,82

Sumber: statistik.kkp.go.id, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 Kabupaten Bangkalan adalah Kabupaten dengan produksi garam paling rendah diantara 3 kabupaten yang ada di Madura. Tabel 1.2 menunjukkan pada tahun 2021 Kabupaten Bangkalan hanya memproduksi garam sebesar 2.827,40 ton. Rendahnya produksi garam di Kabupaten Bangkalan, karena Kabupaten Bangkalan memiliki lahan garam yang tidak luas di bandingkan dengan kabupaten lainnya dan kendala yang dialami oleh Kabupaten Bangkalan dalam produksi garam adalah curah hujan yang tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian (Heryanto, 2012) yang mengemukakan bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki lahan garam yang lebih sempit dan curah hujan

lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Wilayah penghasil garam di Kabupaten Bangkalan terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepuluh dan Kecamatan Tanjung Bumi. Berdasarkan wilayahnya produksi garam di Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Produksi Garam di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2021

Kecamatan	Produksi (ton)		
	2019	2020	2021
Kamal	241,40	667,00	285,00
Kwanyar	152,00	133,50	524,00
Klampis	240,48	805,60	224,40
Sepuluh	220,40	688,50	394,00
Tanjung Bumi	1.200,00	1.560,00	1.400,00
Total	2.054,28	3.854,60	2.827,40

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa produksi garam di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 mengalami penurunan, tetapi pada Kecamatan Kwanyar produksinya mengalami peningkatan. Kecamatan Kwanyar memiliki 16 Desa/Kelurahan, dengan luas 47,97 km² atau 4797 ha, pada ketinggian 6-24 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan juga memiliki suhu mencapai 32°C yang merupakan kawasan pesisir, berbatasan dengan Selat Madura (Aminuloh *et al.*, 2019). Sumber daya alam di Kecamatan Kwanyar didominasi oleh kegiatan usaha perikanan, seperti perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dan usaha garam, tetapi kegiatan usaha garam masih belum mendapatkan perhatian lebih dibanding kegiatan usaha perikanan lainnya (Aminuloh *et al.*, 2019).

Petani garam di Desa Pesanggrahan, merupakan salah satu pekerja musiman karena mereka bekerja pada musim kemarau. Faktor keberhasilan para petani garam di Desa Pesanggrahan ini tergantung pada kondisi alam, karena mereka masih menggunakan teknologi tradisional yang memanfaatkan panas matahari dalam proses pembuatan garam. Pada saat musim kemarau, menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung dalam proses pembuatan garam tradisional di Desa Pesanggrahan, karena kondisi alam seperti ini bisa memperlancar proses pembuatan garam sekaligus menambah hasil produksi garam tersebut.

Petani garam di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan Madura masih memiliki kelemahan dan kekurangan dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan permasalahan yang ada pemerintah perlu mengadakan pemberdayaan karena upaya pemerintah sangat penting dalam meningkatkan produksi dan kualitas garam di daerah pesisir. Potensi yang dimiliki oleh Desa Pesanggrahan, pemerintah daerah beserta stakeholder yang terlibat ikut berperan dalam upaya pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam agar membantu dalam peningkatan produksi, kualitas dan peningkatan harga garam di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian (Wismanu *et al.*, 2023) bahwa masih banyak petani garam yang belum mampu meningkatkan hasil panen produktivitas karena banyak faktor internal dan eksternal yang belum dipelajari secara mendalam, termasuk pemerintah, swasta

dan masyarakat dalam memberdayakan petani garam.

Pemberdayaan masyarakat adalah satu kekuatan yang sangat vital. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik, material, aspek ekonomi dan pendapatan, aspek kelembagaan (tumbuhnya kekuatan individu dalam bentuk wadah atau kelompok), kekuatan kerjasama, kekuatan intelektual dan kekuatan komitmen bersama untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan (Mangowal, 2013). Arti pentingnya pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemandirian, agar masyarakat mampu berbuat, memahami serta mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah pulihnya nilai-nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, merdeka, dan mandiri (Miski, 2022). Proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin (Hadiyanti, 2008).

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2014 tentang kewenangan wilayah pesisir terletak di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana bahwa kewenangan pemberdayaan masyarakat pesisir berada diwilayah Provinsi. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Edi Wijono selaku tim teknis pendataan garam di Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir sepenuhnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, jadi Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan hanya sebagai fasilitator untuk program pemberdayaan yang diperuntukkan untuk masyarakat pesisir, sehingga program tersebut masih perlu arahan dan dukungan penuh dari Dinas Provinsi. Selain itu, tidak meratanya bantuan sarana dan prasarana yang diberikan kepada kelompok petani garam dan kurang optimalnya sosialisasi atau pelatihan yang hanya diberikan satu kali dalam setahun, serta kurang terlibatnya lembaga terkait seperti koperasi garam, BUMDES, dan organisasi lainnya yang ada di Desa Pesanggrahan.

Berdasarkan implementasi kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011, tentang "Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional", dan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 05/PER-DJKP3K/2014 Tahun 2014 tentang "Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat", pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan lembaga masing-masing. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian (Erna & Adriyani, 2017) tindak lanjut kebijakan pemerintah ini adalah dicanangkannya Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terhadap masyarakat pesisir pantai. Selain itu, program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan produksi garam sebagai salah satu implikasi dari target pemerintah dalam rangka menyediakan kebutuhan garam nasional serta mengurangi impor garam.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar dan pendapat di atas, pemerintah berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, kebutuhan masyarakat dan kepentingan, dalam hal ini pemerintah merumuskan kebijakan dalam mengatur dan mendukung peningkatan produksi garam dengan pemberdayaan dan pelatihan. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam agar lebih optimal dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh penelitian (Amanda & Buchori, 2015) bahwa upaya agar masyarakat lokal memiliki kapasitas dalam mengelola sumber daya lokalnya adalah melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah diharapkan dapat melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program-program pemberdayaan khususnya bagi petani garam. Maka dari itu perlu adanya pemberdayaan oleh Dinas Perikanan di Kabupaten Bangkalan yang berperan membantu petani garam dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Program Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan" yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemberdayaan petani garam di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2016).

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut (Solichin, 2012) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian". Selain definisi semacam itu, implementasi kebijakan dapat pula dianggap suatu proses, keluaran (output) dan hasil akhir (outcome).

Teori Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Dalam konteks yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat berarti orang yang tidak berdaya diberikan kekuasaan melalui pemberdayaan sehingga masyarakat menjadi berdaya. Konkretnya, pemberdayaan masyarakat menyangkut peningkatan kekuatan pada kelemahan masyarakat (Saharuddin *et al.*, 2023).

Konsep Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Terry, 1960) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2017) bahwa perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi dimasa mendatang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki.

Konsep Pemantauan dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Mardikanto & Soebiato, 2017) pokok-pokok pengertian tentang evaluasi, yang mencakup:

1. Evaluasi adalah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, gejala alam, atau sesuatu obyek.
2. Membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita ketahui dan atau memiliki,
3. Melakukan penilaian atas segala sesuatu yang diamati berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan oleh beberapa aktor yang memegang peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Aktor-aktor dalam pemberdayaan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, Dalam hal ini peran mereka saling berkaitan pada proses pemberdayaan yang dilakukan dalam pembangunan nasional (Yektiningsih *et al.*, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Informan yang dipilih yaitu kepala seksi pembinaan budidaya ikan dan pembenihan bapak Edi Wijono, tim enumerator pendamping garam bapak Panca Yulianto, dan kelompok petani garam Bapak Mahdori, Bapak Sarif, dan Bapak Zaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori (Mardikanto & Soebiato, 2017) yang mengemukakan 4 lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu: a). pengembangan kapasitas manusia, b). pengembangan kapasitas usaha, c). pengembangan kapasitas lingkungan, dan d). pengembangan kapasitas kelembagaan. Dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, yang kemudian data dianalisis serta diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identifikasi Kebijakan Pemberdayaan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2016).

Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program

merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan dalam sebuah organisasi. Perubahan yang mengarah ke pengembangan akan berdampak pada masyarakat, dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting yaitu memberikan motivasi dan membangkitkan potensi yang dimiliki (Rintiyani *et al.*, 2022). Berikut tahapan kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan:

5.1.1 Perencanaan Program Pemberdayaan

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan-faktor-fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi dimasa mendatang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki (Terry, 1960) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2017).

Selaras dengan pengertian-pengertian diatas, adanya suatu perencanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat akan memberikan “kerangka kerja” (framework) yang dapat dijadikan acuan oleh para fasilitator dan semua pemangku kepentingan atau stakeholders (termasuk warga masyarakatnya) untuk mengambil keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan. Dilain pihak, setiap program pemberdayaan masyarakat harus dirancang dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat setempat dan kegiatan apa yang menurut mereka (fasilitator bersama masyarakat) paling efektif demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut (Mardikanto & Soebiato, 2017).

Sebagaimana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam perencanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan yaitu dengan melihat potensi, isu/permasalahan yang dihadapi oleh kelompok petani garam seperti kualitas garam yang masih rendah, teknologi produksi yang belum modern, dan rusaknya alat produksi garam sehingga dapat menghambat proses produksi garam di Desa Pesanggrahan. Kemudian menentukan tujuan dan sasaran yang mana program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi garam dan meningkatkan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat petani garam sedangkan sasaran yang ditujukan kepada setiap kelompok petani garam di 5 sentra garam di Kabupaten Bangkalan (Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Kamal, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Klampis, dan Kecamatan Tanjung Bumi). Setelah menentukan tujuan dan sasaran, kemudian strategi dan cara juga sebagai salah satu proses perencanaan program pemberdayaan tersebut yaitu dengan melakukan beberapa penyuluhan kepada kelompok petani garam dan juga memberikan bantuan sarana dan prasarana sebagai penunjang produksi garam.

Berdasarkan beberapa pernyataan informan bahwa Perencanaan program pemberdayaan ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena menjadi salah satu proses untuk keberhasilan adanya program pemberdayaan masyarakat petani garam tersebut. Hal ini sesuai dengan (Mardikanto & Soebiato, 2017) bahwa adanya suatu perencanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat akan memberikan “kerangka kerja” (framework) yang dapat dijadikan acuan oleh para fasilitator dan semua pemangku kepentingan

atau stakeholders (termasuk warga masyarakatnya) untuk mengambil keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan. Dilain pihak, setiap program pemberdayaan masyarakat harus dirancang dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat setempat dan kegiatan apa yang menurut mereka (fasilitator bersama masyarakat) paling efektif demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

5.1.2 Implementasi Program Pemberdayaan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai (Solichin, 2012). Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya (Agustino, 2016). Program Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:

5.1.2.1 Sosialisai/Pelatihan Mengenai Produksi Garam

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan pada petani garam sudah tersedia sumber daya yang memadai, salah satu yang menjadi sumber pendukung dalam program pemberdayaan usaha garam ini yaitu penyuluh perikanan di wilayah garam dan petambak garam dan juga kegiatan-kegiatan yang berupa pelatihan/sosialisasi yang biasanya dilakukan 2-3 kali dalam 1 tahun dan pihak yang terlibat seperti Kelompok Garam, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan dan instansi yang terkait lainnya yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat petani garam. Untuk itu pengembangan kapasitas manusia ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan dalam sebuah organisasi.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan kepada masyarakat/kelompok garam selama ini yaitu tentang Pelaksanaan kegiatan tata cara atau pembuatan garam beryodium, dan juga pelatihan inovasi produksi garam untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam. Kegiatan ini biasanya lebih sering dilakukan di aula dinas perikanan dan

media yang digunakan secara langsung maupun online, tetapi untuk praktek mengenai teknologi produksi garam biasanya dilakukan langsung ditambah garam masing-masing kecamatan secara bergiliran.

Berdasarkan beberapa pernyataan informan bahwa Pelatihan/sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan kepada petani garam dalam program pemberdayaan usaha garam ini sebagai upaya untuk membantu dan mengembangkan usaha garam di Desa Pesanggrahan. Hal ini sesuai dengan penelitian (Subekti *et al.*, 2018) yang menunjukkan bahwa Indikator dari pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya. Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*), Artinya masyarakat dibina dan dilatih agar mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis sehingga masyarakat dapat maju dan memberdayakan dirinya melalui usaha-usaha ekonomi yang produktif.

5.1.2.2 Bantuan Sarana dan Prasarana

Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan melakukan pembenahan dalam sarana dan prasarana berdasarkan dari proposal yang diajukan oleh sekertaris desa kepada pendamping tim enumerator dari Dinas Perikanan. Beberapa hal yang dilakukan seperti kincir angin yang di pergunakan untuk mengaliri air ke tambak garam, petani garam juga mendapatkan bantuan pipa untuk memperlancar saluran air, geomembran untuk memisahkan air laut dengan tanah, serok, dan sesser yang digunakan untuk meratakan tanah, selain itu ada juga gudang tempat penyimpanan garam, dan Pembangunan Jalan Produksi.

Penyediaan berbagai masukan dengan bantuan sarana dan prasarana, sangat penting dalam pemberdayaan petani garam, karena dengan bantuan sarana dan prasarana akan mempermudah ataupun menjadi menyelesaikan masalah yang di hadapi oleh petani garam dalam proses memproduksi garam di Desa Pesanggrahan.

Berdasarkan beberapa pernyataan informan bahwa Dengan adanya program dan bantuan sarana dan prasarana yang diterima oleh kelompok garam sudah pasti sesuai apa yang dibutuhkan untuk menunjang prosen produksi garam. Hal ini sesuai dengan (Yunus *et al.*, 2017) yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak saja dilakukan melalui pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung proses perubahan tersebut maka peranan pemerintah dapat dilakukan antara lain melalui; (1) penyediaan sarana prasarana fisik, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian dan lingkungan usaha. (2) Fasilitasi percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. (3) Fasilitasi pembentukan iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta investasi. (4) Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat petani.

5.1.2.3 Peninggian Saluran Tambak

Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan melakukan program bantuan lingkungan seperti normalisasi saluran tambak garam dan peninggian saluran tambak garam. Berdasarkan beberapa pernyataan informan bahwa bantuan saluran irigasi, peninggian saluran tambak, dll, sudah terealisasikan di beberapa

kecamatan dengan tujuan untuk memperlancar dan meningkatkan proses produksi garam. Hal ini sesuai dengan (Mardikanto & Soebioto, 2017) yang mengatakan bahwa pengembangan kapasitas lingkungan sangat diperlukan karena pengembangan kapasitas usaha yang tidak terkendali dapat menjurus pada ketamakan atau kerakusan yang dapat merusak lingkungan dan pelestarian lingkungan akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi.

Sedangkan dampak dari adanya bantuan program lingkungan yang telah dilakukan Dinas Perikanan tidak berdampak terhadap lingkungan sekitar dan lebih berdampak positif terhadap produksi garam. Hal ini sesuai dengan penelitian (Rintiyani et al., 2022) yang menunjukkan bahwa bantuan program lingkungan yang diberikan tersebut tidak berdampak terhadap lingkungan justru mempunyai dampak yang positif untuk mengurangi penyimpanan garam yang ada di pinggir jalan.

5.3 Evaluasi Program Pemberdayaan

Menurut (Mardikanto & Soebiato, 2017) mengemukakan bahwa Evaluasi adalah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, gejala alam, atau sesuatu obyek. Membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita ketahui dan atau memiliki, Melakukan penilaian atas segala sesuatu yang diamati berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan.

Evaluasi program pemberdayaan merupakan hal yang harus diperhatikan karena dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu proses yang sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan dalam sebuah organisasi. Selain itu juga terdapat pembagian tugas dan evaluasi dari program tersebut melalui bidang kelembagaan dan pengawasan usaha perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan.

Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh kelompok petani garam yang ada di Kabupaten Bangkalan, khususnya Desa Pesanggrahan melalui program pemberdayaan petani garam. Program Pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Perikanan sudah berjalan sesuai harapan dan sangat membantu petani garam yang ada Desa Pesanggrahan dalam proses produksi garam.

Program Pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Perikanan sudah berjalan sesuai harapan dan sangat membantu petani garam yang ada Desa Pesanggrahan dalam proses produksi garam, meskipun kebijakan ini masih perlu arahan dan perbaikan kedepannya dalam implementasi program pemberdayaan tersebut. Hal ini sesuai dengan (Suharto, 2007) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan diharapkan tercapai perubahan sesuai yang direncanakan. Namun demikian kemungkinan akan terjadi penolakan terhadap perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut.

Faktor pendukung dalam pemberdayaan petani garam yaitu potensi laut yang ada di Kabupaten Bangkalan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk produksi garam, selain itu sarana dan prasarana penunjang kepada petani garam yang dapat mempermudah dalam produksi garam, dan juga memberikan pengetahuan metode dalam proses mempercepat pengkristalan garam. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu latar belakang pendidikan, aturan kebijakan pemerintah yang tidak memiliki wewenang langsung, adanya beberapa sarana dan prasarana yang tidak bekerja secara optimal sehingga menghambat

dalam proses produksi, serta kurangnya gotong-royong antar masyarakat dalam penyelesaian masalah dan kurangnya kesadaran untuk menjaga fasilitas yang ada.

5.2 Identifikasi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang bersekinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat mandiri yang menjemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya (Suhendra, 2006).

Pemberdayaan merupakan kegiatan yang dilakukan terus-menerus untuk melakukan penambahan keterampilan ataupun pengetahuan tentang metode atau keterampilan yang belum dimiliki masyarakat (Miski, 2022). Pemberdayaan merupakan sebuah proses kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan (Mardikanto & Soebiato, 2017). Menurut (Mardikanto & Soebiato, 2017) mengemukakan 4 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu sebagai berikut :

5.2.1 Pengembangan Kapasitas Manusia

Pengembangan Kapasitas Manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi. Faktor sumber daya ini yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial (Mardikanto & Soebiato, 2013).

Sebagaimana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam pengembangan kapasitas manusia ini dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan pada petani garam sudah tersedia sumber daya yang memadai, salah satu yang menjadi sumber pendukung dalam program pemberdayaan usaha garam ini yaitu penyuluh perikanan di wilayah garam dan petambak garam dan juga kegiatan-kegiatan yang berupa pelatihan/sosialisasi yang biasanya dilakukan 2-3 kali dalam 1 tahun dan pihak yang terlibat seperti Kelompok Garam, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan dan instansi yang terkait lainnya yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat petani garam. Untuk itu pengembangan kapasitas manusia ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan dalam sebuah organisasi.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan kepada masyarakat/kelompok garam selama ini yaitu tentang Pelaksanaan kegiatan tata cara atau pembuatan garam beryodium, dan juga pelatihan inovasi produksi garam untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam. Kegiatan ini biasanya lebih sering dilakukan di aula dinas perikanan dan media yang digunakan secara langsung maupun online, tetapi untuk praktek mengenai teknologi produksi garam biasanya dilakukan langsung ditambah garam masing-masing kecamatan secara bergiliran.

Berdasarkan beberapa pernyataan informan bahwa Pelatihan/sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan kepada petani garam dalam program pemberdayaan usaha garam ini sebagai upaya untuk membantu dan mengembangkan usaha garam di Desa Pesanggrahan. Hal ini sesuai dengan penelitian (Subekti *et al.*, 2018) yang menunjukkan bahwa Indikator dari pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya. Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*), Artinya masyarakat dibina dan dilatih agar mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis sehingga masyarakat dapat maju dan memberdayakan dirinya melalui usaha-usaha ekonomi yang produktif.

5.2.2 Pengembangan Kapasitas Usaha

Pengembangan kapasitas usaha yaitu mencakup pemilihan komoditas dan jenis usaha, studi kelayakan dan perencanaan bisnis, pembentukan badan usaha, perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan, pengelolaan SDM dan pengembangan karir, manajemen produksi dan operasi, manajemen logistik dan finansial, penelitian dan pengembangan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis, Pengembangan jejaring dan kemitraan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung (Mardikanto & Soebiato, 2017).

Pengembangan Kapasitas Usaha yang meliputi peningkatan pengetahuan teknis guna memperbaiki nilai tambah produk, perbaikan manajemen agar bertambahnya jejaring kemitraan, pengembangan jiwa wirausaha, peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi (Miski, 2020). Sebagaimana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam pengembangan kapasitas usaha ini salah satu program yang diberikan yaitu program pengembangan sarana dan prasarana, dan juga pengembangan aksesibilitas pasar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam pengembangan kapasitas usaha ini Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan melakukan pembenahan dalam sarana dan prasarana berdasarkan dari proposal yang diajukan oleh sekertaris desa kepada pendamping tim enumerator dari Dinas Perikanan. Beberapa hal yang dilakukan seperti kincir angin yang di pergunakan untuk mengaliri air ke tambak garam, petani garam juga mendapatkan bantuan pipa untuk memperlancar saluran air, geomembran untuk memisahkan air laut dengan tanah, serok, dan sesser yang digunakan untuk meratakan tanah, selain itu ada juga gudang tempat penyimpanan garam, dan Pembangunan Jalan Produksi.

Penyediaan berbagai masukan dengan bantuan sarana dan prasarana, sangat penting dalam pemberdayaan petani garam, karena dengan bantuan sarana dan prasarana akan mempermudah ataupun menjadi menyelesaikan masalah yang di hadapi oleh petani garam dalam proses memproduksi garam di Desa Pesanggrahan.

Berdasarkan beberapa pernyataan informan bahwa Dengan adanya program dan bantuan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan, masyarakat menerima dan berdampak baik bagi kelompok petani garam di Desa Pesanggrahan. Adanya bantuan seperti itu

masyarakat khususnya kelompok petani garam menjadi termotivasi dan sangat terbantu dalam meningkatkan kualitas dari KP2 menjadi KP1 dan kuantitas pada produksi garam yang meningkat pada tahun 2021. Hal ini sesuai dengan (Yunus *et al*, 2017) yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak saja dilakukan melalui pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung proses perubahan tersebut maka peranan pemerintah dapat dilakukan antara lain melalui; (1) penyediaan sarana prasarana fisik, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian dan lingkungan usaha. (2) Fasilitasi percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. (3) Fasilitasi pembentukan iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta investasi. (4) Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat petani.

5.2.3 Pengembangan Kapasitas Lingkungan.

Menurut (Mardikanto & Soebiato, 2017) mengatakan bahwa pengembangan kapasitas lingkungan sangat diperlukan karena pengembangan kapasitas usaha yang tidak terkendali dapat menjurus pada ketamakan atau kerakusan yang dapat merusak lingkungan. Fokus dalam pengembangan kapasitas Lingkungan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan di Kabupaten Bangkalan apakah berdampak pada lingkungan serta bagaimana cara mengatasinya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam pengembangan kapasitas lingkungan ini, Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan melakukan program bantuan lingkungan seperti normalisasi saluran tambak garam dan peninggian saluran tambak garam.

Berdasarkan beberapa pernyataan informan bahwa Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar belum pernah mendapatkan bantuan saluran irigasi, peninggian saluran tambak, dll, tetapi program bantuan sudah terealisasikan di beberapa kecamatan dengan tujuan untuk memperlancar dan meningkatkan proses produksi garam. Hal ini sesuai dengan (Mardikanto & Soebiato, 2017) yang mengatakan bahwa pengembangan kapasitas lingkungan sangat diperlukan karena pengembangan kapasitas usaha yang tidak terkendali dapat menjurus pada ketamakan atau kerakusan yang dapat merusak lingkungan dan pelestarian lingkungan akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi.

Sedangkan dampak dari adanya bantuan program lingkungan yang telah dilakukan Dinas Perikanan tidak berdampak terhadap lingkungan sekitar dan lebih berdampak positif terhadap produksi garam. Hal ini sesuai dengan penelitian (Rintiyani *et al.*, 2022) yang menunjukkan bahwa bantuan program lingkungan yang diberikan tersebut tidak berdampak terhadap lingkungan justru mempunyai dampak yang positif untuk mengurangi penyimpanan garam yang ada di pinggir jalan.

5.2.4 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

Menurut (Mardikanto & Soebiato, 2017) mengatakan bahwa kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas/Masyarakat. Bahwa tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha dan pengembangan kapasitas lingkungan.

Fokus dalam pengembangan kapasitas kelembagaan yaitu terkait siapa saja lembaga yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan.

Sebagaimana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan bahwa lembaga-lembaga yang terkait dalam program pemberdayaan masyarakat petani garam ini seperti Kelompok Petani Garam, Pemerintah Desa, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan dalam melakukan kegiatan atau pelaksanaan program dan persebaran bantuan dengan membentuk kelompok dan melibatkan lembaga atau pihak-pihak terkait dalam kegiatan pemberdayaan petani garam, hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam menyalurkan bantuan.

Berdasarkan beberapa pernyataan informan menunjukkan bahwa lembaga terkait dalam kegiatan pemberdayaan petani garam yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan juga Kelompok Petani Garam. Hal ini sesuai dengan penelitian (Yektiningsih *et al.*, 2020) yang mengatakan bahwa pelaksanaan pemberdayaan dilakukan oleh beberapa aktor yang memegang peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Aktor-aktor dalam pemberdayaan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, Dalam hal ini peran mereka saling berkaitan pada proses pemberdayaan yang dilakukan dalam pembangunan nasional.

Pengertian tentang kelembagaan, seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok, organisasi). Tetapi, kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang lebih luas. Menurut (Mardikanto & Soebiato, 2017) mengatakan bahwa kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas/Masyarakat. Kata kelembagaan sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu "social institution" atau pranata sosial dan "social organization" atau organisasi sosial.

Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan dalam melakukan kegiatan atau pelaksanaan program dan persebaran bantuan dengan membentuk aturan main kelembagaan terhadap kelompok petani garam hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam menyalurkan bantuan.

Berdasarkan beberapa pernyataan informan mengenai aturan main kelembagaan dari Dinas sendiri yaitu dengan membentuk kelompok petani garam di setiap kecamatan sentra garam dengan masing-masing tiap kelompok berjumlah lebih dari 10 orang dan memiliki lahan sendiri. Desa Pesanggrahan merupakan satu-satunya desa desa penghasil garam di Kecamatan Kwanyar yang terdiri dari 2 kelompok garam yaitu kelompok garam makmur dan kelompok garam melati. Dinas Perikanan melakukan atau membentuk kelompok garam agar lebih mempermudah dalam pemberdayaan ataupun pemberian bantuan. Hal ini sesuai dengan (Mardikanto & Soebioto, 2017) mengatakan bahwa kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas/Masyarakat. Pengembangan kapasitas kelembagaan, bahwa dengan tersedianya efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha dan pengembangan kapasitas lingkungan.

PENUTUP KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah dibahas dalam penelitian ini dengan menganalisis melalui empat model Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan dalam pengembangan kapasitas manusia ialah sudah melakukan beberapa bentuk kegiatan seperti pelatihan/sosialisasi, pendataan dan inventarisasi kelompok garam yang dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun dengan menggunakan media secara langsung maupun online. Dalam pengembangan kapasitas usaha ini Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan dibuktikan dengan adanya beberapa bantuan dari program Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam yaitu alat-alat produksi seperti pompa air, kincir angin, serok, terpal, plastik HDPE/Geomembran yang diberikan di Desa Pesanggrahan. Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan dalam pengembangan kapasitas lingkungan ini sudah terdapat dua jenis bantuan dari program Pemberdayaa Masyarakat Petani Garam yaitu Normalisasi Saluran Tambak Garam dan Peninggian Saluran. Dalam pengembangan kapasitas kelembagaan ini Dinas Perikanan melakukan atau membentuk kelompok garam. Hal ini dilakukan agar lebih mempermudah dalam pemberdayaan ataupun pemberian bantuan.

SARAN

Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan diharapkan agar kegiatan pelatihan/sosialisasi lebih sering dilakukan dan lebih mendekati ke masyarakat petani garam, memberikan bantuan program secara berkelanjutan agar produksi garam tetap berkualitas, selalu melakukan monitoring lapangan untuk tetap memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat petani garam ini tidak berdampak pada lingkungan dan juga diharapkan bantuan program lingkungan ini dapat terealisasi merata di semua Desa penghasil garam di Kabupaten Bangkalan termasuk Desa Pesanggrahan, selain itu, juga diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan juga membentuk dan melibatkan lembaga-lembaga yang terkait seperti Koperasi Garam, BUMDes, agar ikut berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: CV. Alfabeta .
- Amanda, R. P., & Buchori, I. (2015). Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) Tahun 2014 Terhadap Tingkat Keberdayaan Petani Garam Rakyat Di Kecamatan Kaliori. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(4), 553–564.
- Aminuloh, A. F., Supenti, L., & Kamsiah, K. (2019). Analisis Permasalahan Usaha Garam Rakyat di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 13(1), 93–105. <https://doi.org/10.33378/jppik.v13i1.116>
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cholisin. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial*, 19–20. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.pdf>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif*,
-

- Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi 4. Pustaka Pelajar.
- Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan. (2022). *Data Produksi Garam di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2021*.
- Erna, & Adriyani, R. (2017). Implementasi Kebijakan Pugar Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Di Pesisir Pantai Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*.
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Hadiyanti, P. (2008). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di PKBM Rawasari, Jakarta Timur. *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, 17.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Hasan, M.I (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Heryanto, A. (2012). *Garam Rakyat Potensi dan Permasalahan Madura*. Madura.
- Ihsannudin, I., Pinujib, S., Subejo, S., & Bangko, B. S. (2018). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Petani Garam Melalui Pendayagunaan Aset Tanah Pegaraman. *Economics Development Analysis Journal*, 5(4), 395–409. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i4.22177>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Produksi Garam Nasional Tahun 2017-2021*. <http://statistika.kkp.go.id>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Produksi Garam di Pulau Madura Tahun 2019-2021*.
- Kristina, A. (2020). *Belajar Mudah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rumah Media.
- Kurniawan, B., Suryono, A., & Saleh, C. (2019). Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Garam Rakyat (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep). *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(3), 136–148. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2014.017.03.4>
- Mangowal, J. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*. *Governance*, 5(1).
- Mardikanto, T., Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung.
- Miski, M. (2022). Pemberdayaan Petani Garam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hermeneutika*, 8(1), 58–73.
- Nazizah, F. (2022). Tingkat Pendapatan Petani Garam yang Menggunakan Geomembran di Desa Lembung , Kecamatan Galis , Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Agrosainta*, 6(1), 21–28.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2014 tentang kewenangan wilayah pesisir.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan* (<https://peraturan.bpk.go.id>).
- Prastio, L. O. (2019). Strategi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Di Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp)*, 1(1), 62–73. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v1i1.1647>

- Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.
- Rintiyani, R., Syafriyani, I., & Yuliastina, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi (*Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep*). *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 17(1), 46–63.
- Saharuddin, Larasati, E., Suwitri, S., & Dwimawanti, I. H. (2023). Policy Evaluation Of Empowerment Of Coastal Poor Communities Through Integrated People's Salt Technology In 2018-2019 (Study in North Aceh District). *Internasional Journal of Educational Review, Law And Social Sciences*, 3(2), 459–475.
- Solichin. A. W. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Statistika Kabupaten Bangkalan.(2016). *Kecamatan Kwanyar Dalam Angka 2021*. <https://bangkalankab.bps.go.id/>
- Subekti, P., Setianti, Y., & Hafiar, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kawistara*, 8(2), 148. <https://doi.org/10.22146/kawistara.30379>
- Sugiharto, E. (2007). *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*. 4(2), 32-36.
- Sugiyono (2001). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. E. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suhendra, K, (2006). *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani (2017).*Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*.Yogyakarta: Gava Media.
- Suryati, & Hatimah, H. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Lombok Timur melalui Program Fortifikasi Garam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 6. <https://journal-center.litpam.com/index.php/linov>
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2016. *Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam*. <https://kkp.go.id>
- Undang-undang No 11 Tahun 2009. *Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2013. *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.
- Wismanu, R. E., Prakasa, Y., & Wahyudi, L. E. (2023). Stakeholders Collaboration to Stimulate the Economic Empowerment for Salt Farmers in Pamekasan Regency. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 18(1), 1–10.
- Wulanjari, M. E., & Setiani, C. (2018). Strategi Pemberdayaan Petani Dalam Berusahatani. *Jurnal Pengkajian Teknologi Pertanian*, 1(10), 41–51. <http://digital.library.ump.ac.id/51/1/4>.
- Yektiningsih, E., Madyowati, S. O., & Sugiarto. (2020). Srategi Pemberdayaan Kelompok Tani Garam. *Jurnal Techno-Fish*, IV(1), 1–11.
- Yin, R.K. (2012). *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yunus, S., Suadi., dan Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Bandar Publishing.
-